

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi politik tahun 1998 ternyata belum membawa perubahan signifikan pada wajah partai politik di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan partai politik yang hanya muncul menjelang momen tertentu (*electoral moments*), dan kuatnya oligarki elit dalam pengelolaan internal partai. Menurut penulis hal ini tak bisa dilepaskan dari karakteristik umum dari partai modern yang ada di Indonesia yang masih terjebak pada pengelolaan tradisional yaitu logika patronase yang tak bisa di tinggalkan. Inilah alasan mengapa partai politik di Indonesia saat ini oleh banyak kalangan sering disebutkan hanya berfungsi sebagai kendaraan elit guna memperoleh kekuasaan dan tidak memiliki kinerja yang baik.

Lebih lanjut mengenai hal tersebut, menurut Ari Dwipayana¹ kondisi rendahnya kinerja partai politik di Indonesia pada awalnya disebabkan proses rekrutment dan kaderisasi partai politik itu sendiri. Hal tersebut dapat di analisis melalui :

¹Dosen dan pengamat politik UGM, aktif mengajar untuk mata kuliah partai politik dan kajian politik Indonesia di program pascasarjana politik dan pemerintahan UGM.

Pertama, proses pembentukan partai politik pasca reformasi cenderung didorong oleh elit. Pola pembentukan ini juga diikuti dengan pola rekrutmen yang tidak berbasis pada kaderisasi, namun, didasarkan pada pengambilan tokoh-tokoh masyarakat yang terlebih dulu telah memiliki basis ekonomi & massa yang cukup kuat. Tujuan dari pola ini adalah meraup suara yang sebanyak-banyaknya secara instan. Ini menjadi bertolak belakang dengan salah satu prinsip dalam pengelolaan partai modern yang mensyaratkan adanya kaderisasi.

Kedua, sistem kaderisasi partai politik sama sekali tidak berjalan dengan baik, sehingga ketika pola inklusif dibuka begitu saja, akan memunculkan perpaduan baru dalam partai, yaitu fragmentasi. Namun, fragmentasi disini tidak bersumber dari perbedaan ideologis dalam mengelola partai, namun didasarkan atas perbedaan kepentingan. Kecenderungan karakteristik partai politik yang demikian, dalam pandangan Ari Dwipayana, pada akhirnya menghasilkan gejala neofeodalisme partai politik². Berangkat dari hal tersebut penulis menilai proses rekrutment dan kaderisasi partai politik menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti.

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, hukum alamnya setiap manusia akan mengalami tua dan penurunan daya kemampuan, begitu juga dengan partai politik, ia membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik, maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus. Sistem kaderisasi

²Bahan diolah dari website JPP (Jurusan Politik Pemerintahan) UGM.
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/>

akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling bantu membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerja sama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berpikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Jika partai politik mampu menghasilkan kader partai yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula. Kriteria karakter kader yang berkualitas mempunyai komitmen, konsistensi dan kompetensi yang tinggi.

Komitmen berarti keberadaan kader bukanlah sekedar keterlibatan secara fisik tetapi menuntut lebih fundamental lagi, karena komitmen merupakan perpaduan ikatan batin, kesetiaan dan tindakan memperjuangkan misi dengan sepenuh hati. Konsistensi berarti kader harus konsisten antara ucapan dan perbuatan, keputusan dan kegiatan, teori dan tindakan. Kompetensi berarti kader harus mempersiapkan diri dengan kemampuan dan kecakapan yang memadai, yang terdiri dari empat kompetensi yaitu, pertama kompetensi keberagaman, kedua kompetensi akademis dan intelektual kader, ketiga kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan dan keempat kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan dalam kaderisasi.

Kompetensi keberagaman kader membekali diri dengan pemahaman keagamaan yang lebih baik, seperti kemurnian aqidah (keyakinan berbasis

tauhid yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi) yang membentuk kesolehan dalam kehidupan. Ketaatan beribadah. Keikhlasan dalam hati, kata, dan tindakan. Amanah (komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi) dalam mengemban tugas.

Kompetensi akademis dan intelektual, kader yang ideal adalah kader yang memiliki intelektulitas yang dicirikan dengan nilai – nilai fathonah (kecerdasan pikiran) dalam berpikir, berwawasan, dan menghasilkan karya pemikiran. Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju) dalam mengembangkan kehidupan dan menggerakkan persyarikatan sesuai jiwa ajaran Islam. Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran, dan tindakan. Moderat (arif dan mengambil posisi di tengah) dalam bersikap, berpikiran dan bertindak.

Kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan, kader yang ideal peka terhadap permasalahan sosial, yang dapat dicirikan dengan nilai-nilai kesolehan (perilaku yang baik) dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat luas. Kepedulian sosial (ketepanggilan dalam meringankan beban hidup orang lain). Suka beramal. Keteladanan . Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif, dan terampil membangun jaringan). Inovatif (menemukan hal-hal baru) dalam mengembangkan kemajuan. Berpikiran maju dan membawa pada kemajuan di berbagai bidang yang menjadi misi partai politik.

Kompetensi keorganisasian dan kepemimpinan, kader yang ideal memiliki semangat berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat dicirikan dengan nilai-nilai partisipasi aktif dalam peran keumatan,

kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, berdedikasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal terbaik. Berkomitmen dan menjunjung tinggi ideologi partai dan mampu bersikap tegas tetapi arif. Mengutamakan misi dan kepentingan di atas lainnya dengan niat ikhlas.

Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transfer kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Proses kaderisasi di dalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam di banyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif untuk membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan.

Kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik. Selanjutnya, wajah-wajah baru akan muncul dan siap untuk menggantikan posisi generasi lama. Dengan begitu, kesinambungan kepemimpinan nasional bisa terjaga dan proses demokratisasi di Indonesia akan bisa berjalan dengan baik demi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian ini sendiri akan mengamati model kaderisasi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang ada di Provinsi Lampung. Menurut penulis PKS sebagai salah satu dari empat partai politik besar yang memperoleh suara dalam Pemilu 2009 yang lalu, merupakan satu-satunya partai politik yang aktifitas kaderisasinya masih berjalan secara intensif.

Menurut penulis PKS merupakan partai yang bercorakkan Islam yang hingga saat ini memiliki basis massa dan kader yang sangat loyal sehingga mudah digerakkan dengan seruan atau bentuk lain seperti jaring komunikasi melalui sms, bbm, lingkaran dakwah seperti *liqo*. Ini tentunya menjadi nilai plus, karena PKS bukan sekedar partai yang bergantung pada massa mengambang seperti kebanyakan partai politik lain. Kader PKS adalah mesin politik yang kuat untuk menjadi penentu kemenangan. Kader PKS selain loyal terkenal sebagai kader yang militan, bahkan ada satu contoh dimana salah satu yang merupakan kader PKS rela kembali ke Jakarta dari Surabaya hanya untuk mencoblos di pemilukada DKI Tahun 2012³.

Sistem kaderisasi dan perjenjangan karir partai tertata rapi. Para anggotanya dikenal sangat militan. Rekrutmen kader melalui sejumlah aktivitas keagamaan dan kegiatan di kampus-kampus. KAMMI, organisasi kemahasiswaan berbasis kampus, sering disebut sebagai *onderbouw* PKS. Melalui relasi yang tidak langsung aktivitas partai merambah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan penerbitan. PKS merupakan partai dengan berbasis ideologi Islam modernis dan dengan pengorganisasian partai yang solid.

³<http://diskusiasik.blogspot.com/2012/07/semua-tentang-pemilukada-dki-1-pks.html>, diunduh pada tanggal 9 September 2012.

Pemikiran-pemikiran *Ikhwanul Muslimin* sangat mewarnai partai. Dalam debat-debat regulasi partai ini banyak mengartikulasikan kepentingan politik Islam. Meskipun demikian, partai ini relatif inklusif dalam membangun kerja sama dengan partai lain, seperti terlibat dalam koalisi pilkada dan program partai.

Peran kader di parlemen dan masyarakat telah menunjukkan bahwa PKS cukup konsisten pada nilai-nilai Islam sebagai hasil dari proses tarbiyah yang berkesinambungan. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dengan beraninya para anggota DPR FPKS untuk menolak dan mengembalikan gratifikasi sebesar Rp. 1,9 milyar⁴. Beragam gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh kader-kader PKS beserta para relawannya, seperti yang dilakukan relawan ke daerah-daerah bencana, mengirimkan bantuan-bantuan sosial, mengadakan kegiatan pengobatan gratis untuk masyarakat, merupakan bentuk penetrasi politis kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ciri khas PKS terlihat pada independensi dan kemandirian politik yang jelas tercermin pada pemeliharaan jarak hubungan dengan kekuasaan dan menghilangkan jarak hubungan dengan rakyat. PKS memang dinilai sebagai partai yang memiliki basis pendukung jelas dan loyal.

Jarak hubungan dengan kekuasaan bukan berarti memusuhi kekuasaan, tetapi justru menempatkan kekuasaan sebagai subjek kekuatan yang dijaga melalui

⁴ Media Indonesia, 14 April 2008

kritik dan kontrol partai agar selalu berbuat adil demi kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya roh, semangat, dan daya ideologi PKS memfokuskan pada keadilan sebagai nilai yang sangat kental dalam Islam dan yang menjadi sendi utama di dalam ideologi kebangsaan kita.

Nilai keadilan sebagai nilai paling mendasar telah menjadi karakter PKS yang selama ini telah menjadi partai politik yang identik dengan generasi muda serta kaum terdidik. Selama ciri khas ini terawat dan terpelihara dengan cermat dan dengan disiplin tinggi, selama itu pula PKS akan tetap menjadi tumpuan harapan pembaruan. Sebagai partai politik, PKS juga melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu rekrutmen politik untuk proses penempatan orang-orang tertentu dalam jabatan politik tertentu yang melibatkan masyarakat secara luas. Proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan dalam proses pengkaderan anggota maupun promosi elit politik baru. Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elit politik. Rekrutmen politik di mana pun memiliki pola yang serupa tapi tidak sama, setidaknya terdapat tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik yaitu:

”Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga indikator yang penting untuk melihat pembangunan serta perubahan dalam sebuah masyarakat⁵.”

⁵ Yuddy Chrisnandi (Dosen Pascasarjana UI)

Berdasarkan ungkapan di atas maka dapat dilihat dalam proses rekrutmen politik tidaklah mudah dilakukan, karena terdapat pertimbangan-pertimbangan karena tanggung jawabnya kepada masyarakat. Pada umumnya cara yang ditempuh partai politik untuk melakukan rekrutmen politik adalah dengan kontak pribadi, persuasi, dan juga menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader, untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Salah satu prosesnya adalah kaderisasi, partai politik memiliki cara sendiri untuk menumbuhkan militansi, dalam tahapan yang dilakukan terdapat proses pula, salah satunya yaitu dengan penanaman ideologi. Sehingga penanaman ideologi pun menjadi salah satu pertimbangan calon kader untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Dalam kebijakan umum PKS, ideologi PKS akan membangun kesadaran politik masyarakat akan terus menguat seiring penguatan ideologisasi dalam tubuh partai-partai politik. Oleh sebab itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan dasar dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya konflik-konflik ideologis di kalangan aktivis partai.

Anis Matta⁶ mengatakan bahwa dilihat dari objek PKS, dapat dilihat dalam kultur internal orang-orang PKS, *statement* jati diri, pola kaderisasi, filosofi, perilaku, baik yang merupakan perilaku sosial maupun perilaku politik, hingga kiprah politiknya pada praksis oleh banyak pihak dilihat bahwa ada berbagai macam kemiripan antara apa yang dilakukan oleh PKS dengan gerakan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Dari gerakan *Ikhwanul Muslimin* yang menginspirasi PKS –sebuah partai politik yang dinilai berbeda– dengan

⁶ dikutip oleh Aay Muhammad Furkon, 2004: Pengantar

salah satu pemikirannya berupa ideologi Islam, yang dapat merekrut kader-kader untuk bersosialisasi dan berpolitik yang hilir-mudik pada perpolitikan di Indonesia, yang nantinya sedikit-banyak akan mengubah jalannya perpolitikan di Indonesia, dengan tujuan lebih baik.

PKS adalah partai yang tidak biasa (*unusual party*). PKS lahir melalui gerakan sosial bernama Tarbiyah yang kemudian bermutasi menjadi partai politik. Basis sosial partai tersebut adalah kelompok muslim terdidik, muda, dan kelas menengah kota. Tidak seperti partai politik lain, PKS mampu mendulang simpati publik dengan memobilisasi kader dan simpatisannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial secara terus-menerus dan tidak hanya menjelang pemilu. PKS tampil sebagai “partai kader” yang menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya, dan membantu korban bencana alam di Indonesia.

Penelaahan proses pembentukan PKS dan proses pembingkai transnasional Islamisnya diharapkan menjadi pintu masuk untuk meneliti beragam faktor di balik kemunculan PKS dari gerakan sosial yang bertransformasi menjadi partai politik. Proses tarik-menarik kepentingan di internal kader PKS juga akan diselidiki secara mendalam untuk melihat disorientasi yang terjadi sesudah peralihan menjadi partai politik. Adanya keinginan untuk memperluas basis massa di tengah logika kompetisi elektoral yang ketat menyebabkan terjadinya “sedikit” pergeseran ideologi yang dimiliki PKS

semakin membuat penulis tertarik untuk melihat bagaimanakah model kaderisasi yang dilakukan PKS.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana tepatnya PKS melakukan model kaderisasi melalui kriteria serta mekanisme sebagai partai politik untuk menghasilkan kader yang berkualitas. Sebagaimana telah diketahui pula, adanya anggapan gerakan *Ikhwanul Muslimin* menginspirasi PKS dalam melakukan tahap-tahap rekrutmen. PKS merupakan partai yang bercorakkan Islam yang hingga saat ini memiliki basis massa dan kader yang sangat loyal. Sistem dan kaderisasi dan perjenjangan karir partai tertata rapi. Adanya identitas keanggotaan partai yang ditunjukkan dengan kartu anggota partai semakin mengidentifikasi bahwa PKS merupakan partai politik di Indonesia yang cukup konsisten dalam menata kaderisasi anggota partainya. Sebab selain partai Gerindra, saat ini PKS merupakan partai politik di Indonesia yang kepemilikan kartu anggota partainya paling banyak.

Para anggota PKS juga dikenal sangat konsisten dan militan. PKS memiliki sistem rekrutmen dan kaderisasi yang khas dan struktur organisasi yang solid dari pusat sampai pada *gross root* yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan luar negeri karena para kadernya juga ada yang berdomisili di luar negeri. PKS dan Kaderisasi merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan, kaderisasi merupakan aktifitas partai yang mutlak dilakukan bagi PKS. Merekrut, membina dan seterusnya dilakukan pemberdayaan terhadap kader, itulah yang

dilakukan PKS, sehingga partai ini memiliki banyak kader yang berkualitas dan berkarakter. Hal ini pulalah yang menjadikan PKS sebagai partai kader yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat mengenai latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah model kaderisasi yang dilakukan oleh PKS, khususnya pada DPW PKS Provinsi Lampung ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana model kaderisasi yang dilakukan oleh PKS pada DPW PKS Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori ilmu politik khususnya fungsi kaderisasi serta penanaman ideologi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta evaluasi bagi PKS untuk melengkapi dan memperbaiki model kaderisasi dan penanaman ideologi.